



Judul : Hari Buruh Internasional - RUU PPRT Diharapkan Segera Disahkan
Tanggal : Selasa, 02 Mei 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

HARI BURUH INTERNASIONAL

RUU PPRT Diharapkan Segera Disahkan

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah aliansi pekerja rumah tangga berharap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga segera dibahas dan disahkan. Mereka khawatir konsolidasi dan tahapan menjelang Pemilihan Umum 2024 membuat proses legislasi di DPR kembali terhambat.

Bersamaan dengan peringatan Hari Buruh Internasional 2023, Senin (1/5/2023), puluhan aktivis dan pekerja rumah tangga (PRT) dari sejumlah aliansi yang tergabung dalam Koalisi Sipil UU PRT larut dalam aksi demonstrasi di kawasan tugu kuda Patung Arjuna Wijaya, Jakarta. Mereka melakukan konvoi dari Bundaran HI hingga kawasan Patung Arjuna Wijaya.

"DIM (daftar inventarisasi masalah) sekarang sedang digodok pemerintah. Kami berharap ini tidak berlarut-larut dan segera dibawa ke DPR. Saat ini elite semakin sibuk dengan berbagai konsolidasi, apalagi tahapan (Pemilu 2024) semakin dekat, takutnya pengesahan semakin tertunda," kata Vivi Widyawati dari Perempuan Mahardhita.

Vivi berharap, jika DIM telah rampung, bisa berlanjut pada agenda pembahasan di DPR pada Masa Persidangan V Tahun 2022-2023 yang dimulai Mei 2023. Setelah itu, pemerintah dan DPR bisa bergerak cepat, apalagi proses sebelumnya cu-

kup lancar sejak RUU ini ditetapkan menjadi RUU Inisiatif DPR pada Maret 2023.

Proses legislasi RUU PPRT sudah berjalan cepat sejak akhir Maret 2023 saat Ketua DPR Puan Maharani mengesahkan RUU PPRT sebagai RUU Inisiatif DPR pada 21 Maret.

Pada 27 Maret, Ketua DPR langsung mengirimkan surat kepada Presiden. Dalam surat itu, Ketua DPR meminta Presiden segera mengirim surat kepada DPR terkait penugasan menteri yang akan membahas RUU PPRT dengan DPR. Kemudian pada 5 April, Presiden Joko Widodo sudah mengirimkan surat presiden (*Kompas*, 11/4/2023).

Namun, proses kembali tersendat saat DIM mulai disusun di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) selaku kementerian yang ditunjuk Presiden untuk memimpin pembahasan RUU PPRT.

Saat itu, DIM yang diharapkan secepatnya disusun dan dibawa ke DPR belum selesai hingga Masa Persidangan IV berakhir pada 13 April 2023. Kemenaker bersama lintas kementerian memilih membahas secara mendetail sehingga pembahasan lebih efektif saat diserahkan ke DPR.

Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi mengungkapkan, saat ini pembahasan DIM di lintas kementerian hampir rampung. "Selagi diselesaikan, kami juga menam-

pung aspirasi dari berbagai pihak sehingga selanjutnya pembahasan yang dilakukan di DPR bisa efektif. Kami bekerja keras dan semoga bisa tuntas sebelum batas tanggal 27 Mei," ujar Anwar.

Kawal dan dorong

Koordinator Jaringan Nasional Advokasi (JALA PRT) Lita Anggraini berharap pengesahan RUU menjadi undang-undang bisa dilakukan secepatnya. Koalisi akan terus mengawal, mendorong, dan mendukung pemerintah menyelesaikan DIM hingga dibahas di DPR.

Dengan demikian, Lita berharap pada masa sidang DPR setelah periode Lebaran, pemerintah dan DPR bisa membahas RUU PPRT serta bisa disahkan dalam jangka waktu tersebut juga. "Sudah 19 tahun, kami menghitung hari huruf R pada RUU PPRT hilang, dan sah sebagai UU PPRT," ucapnya.

Sebagai langkah pengawalan, koalisi akan konsisten melakukan aksi serta memperkuat konsolidasi antarorganisasi dan pemerintah terkait.

"Kami akan tetap melakukan aksi Rabu-an di DPR seperti yang kami lakukan sebelum-sebelumnya. Kami akan terus mengawal ini dengan berbagai konsolidasi dan aksi-aksi serupa hingga sah menjadi undang-undang," kata Luviana dari Aliansi Buruh Perempuan dan PRT. (Z07)